

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terbagi menjadi beberapa pulau. Setiap pulau terdapat provinsi yang mempunyai pemerintah daerah kota atau kabupaten. Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Banyaknya daerah atau kabupaten membuat pemerintah pusat cukup sulit untuk mengkoordinasikan pemerintah daerah.

Untuk mempermudah penataan pemerintahan dan pelayanan pemerintahan, Indonesia mengubah sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, sebagaimana telah diatur pemerintah daerah dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014. Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan, yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonom. Munculnya kebijakan desentralisasi merupakan lahirnya otonomi daerah (Mardiasmo, 2021). Otonomi daerah yaitu wewenang, hak serta kewajiban daerah otonom yang bertujuan untuk mengatur sendiri mengenai urusan pemerintahan daerah serta kepentingan masyarakat daerah tersebut dalam sistem NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014).

Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki tujuan antara lain untuk membantu masyarakat lebih memahami kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk dapat mengetahui penggunaan dana daerah yang berasal dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan berikutnya adalah dapat mendorong pemikiran inovatif dan masyarakat antar daerah dapat bersaing secara sehat. Pemerintah harus dapat memanfaatkan dananya dengan lebih baik dengan salah satu caranya yaitu memangkas biaya yang dirasa kurang diperlukan dan lebih mencari potensi suatu daerahnya agar dapat menambah pendapatan asli daerah untuk dapat mencukupi kebutuhan reformasi pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah.

Dengan berkembangnya pendapatan daerah maka sumber daya masyarakat lokal akan meningkat dan tingkat kemandirian suatu daerah akan meningkat untuk mendukung perekonomian daerah serta dapat mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut umumnya mampu menambah pendapatan masyarakat lokal pada wilayah tersebut. Dana atau Sumber daya pemerintah daerah otomatis dapat meningkat seiring dengan bertumbuhnya pendapatannya tersebut.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah serta dipungut berdasarkan peraturan suatu daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. PAD merupakan sumber pendanaan daerah sebagai bentuk asas desentralisasi dalam melaksanakan otonomi daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Pemerintah daerah diminta untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pendapatan daerah masing-masing. Peningkatan pendapatan daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah.

UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Daerah yaitu iuran yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan dan dibayarkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan pada peraturan yang berlaku, pembayaran pajak bersifat paksaan dan pembayaran pajak tidak ada imbalan secara langsung yang dapat dirasakan. Sedangkan Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pembayaran atas perizinan tertentu yang sudah difasilitasi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan orang pribadi maupun kepentingan suatu badan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan merupakan pembagian laba bersih atau keuntungan dari perusahaan kepemilikan daerah. Perusahaan daerah merupakan suatu perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis perusahaan daerah antara lain terdiri dari perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, pertanian, perkebunan, perbankan dan jasa

keuangan (Bank Pembangunan Daerah). Lain-Lain PAD yang Sah merupakan pendapatan lain yang sah dari suatu daerah, antara lain pendapatan dari hasil penjualan atau hasil sewa barang atau jasa kepemilikan daerah, pendapatan dari jasa giro, pendapatan dari selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing (UU No. 33 Tahun 2004).

Upaya meningkatkan PAD sebaiknya dilihat dari aspek yang lebih luas, bukan hanya melihat dari aspek wilayah mereka masing-masing tetapi juga bagaimana hubungannya dengan persatuan perekonomian negara Indonesia. Pendapatan asli daerah dipandang sebagai jalan pintas untuk mendapatkan dana tambahan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Setiap negara menyadari pentingnya tingkat pendapatan daerah. Oleh karena itu, dapat meningkatkan pendapatan daerah merupakan impian setiap daerah dan juga sangat berpengaruh untuk memajukan negara Indonesia.

PAD mampu menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Jika PAD semakin tinggi, maka tingkat kemandirian daerah tersebut juga semakin tinggi. Kebutuhan daerah akan meningkat setiap tahun, diharapkan jumlah pendapatan dari pajak daerah meningkat agar dapat menopang perekonomian suatu daerah. Dari uraian tersebut, maka pengelolaan sumber pendapatan dari daerah harus lebih dioptimalkan oleh pemerintah daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu Provinsi di Negara Indonesia yang letaknya pada bagian selatan Pulau Jawa. Provinsi DIY terdiri atas 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul serta 1 Kota yaitu Kota Yogyakarta. Ibu Kota pada Provinsi ini adalah Kota Yogyakarta. Mempunyai nama Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena daerah ini memakai sistem kerajaan kesultanan (Badan Pusat Statistik DIY, 2022). Alasan memilih Provinsi DIY sebagai lokasi penelitian adalah karena penulis mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing dan lokasi penelitian tersebut tidak asing bagi penulis.



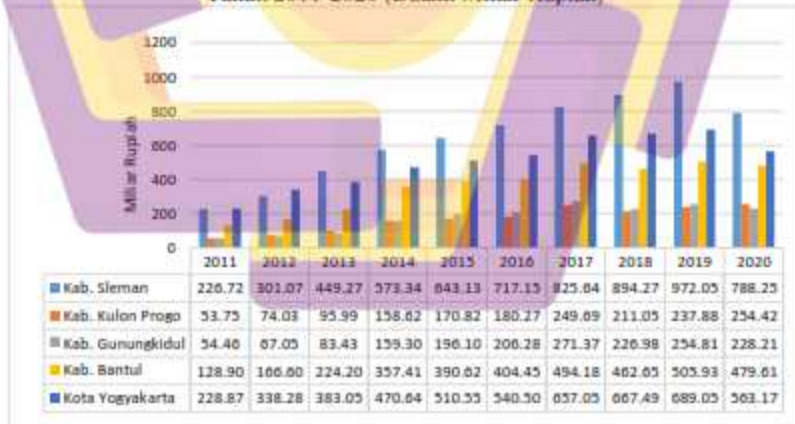
Sumber : <https://peta-hd.com/peta-yogyakarta>.

Gambar 1.1

Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Realisasi PAD pada Provinsi DIY tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam tabel realisasi PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi PAD Seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY
Tahun 2011-2020 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id> dan diolah pada tahun 2023.

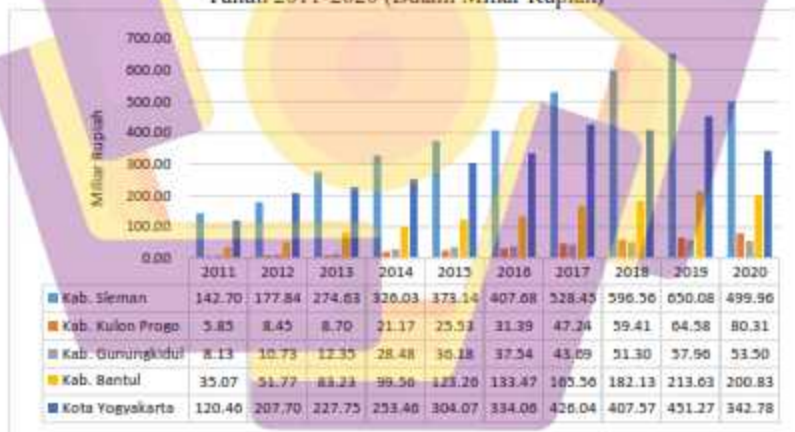
Tabel 1.1 menjelaskan bahwa realisasi PAD pada tahun 2011-2017 seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY selalu mengalami kenaikan PAD. Tahun 2018 Kabupaten Kulonprogo mengalami penurunan PAD sebesar 15,48%, Kabupaten

Gunungkidul mengalami penurunan PAD sebesar 16,36% dan Kabupaten Bantul mengalami penurunan PAD sebesar 6,38%. Tahun 2019 seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY mengalami kenaikan PAD.

Karena efek dari penyebaran pandemi covid-19, pada tahun 2020 Kabupaten Sleman mengalami penurunan PAD sebesar 18,91%. Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan PAD sebesar 10,44%. Kabupaten Bantul mengalami penurunan PAD sebesar 5,20% dan Kota Yogyakarta mengalami penurunan PAD sebesar 18,27%.

PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Berikut adalah realisasi Pajak Daerah seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020:

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Daerah Seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY
Tahun 2011-2020 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id> dan diolah pada tahun 2023.

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2011-2017 selalu mengalami kenaikan pendapatan. Pada tahun 2018 Kota Yogyakarta mengalami penurunan pendapatan pajak daerah sebesar 4,34%. Tahun 2019 seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY mengalami kenaikan pendapatan pajak daerah.

Efek pandemi covid-19 menyebabkan tahun 2020 Kabupaten Sleman mengalami penurunan pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 23,09%. Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan pendapatan yaitu sebesar 7,69%. Kabupaten Bantul mengalami penurunan pendapatan yaitu sebesar 5,99% dan Kota Yogyakarta mengalami penurunan pendapatan yaitu sebesar 24,04%. Berikut merupakan realisasi Retribusi Daerah seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020:

Tabel 1.3
Realisasi Retribusi Daerah Seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY
Tahun 2011-2020 (Dalam Miliar Rupiah)



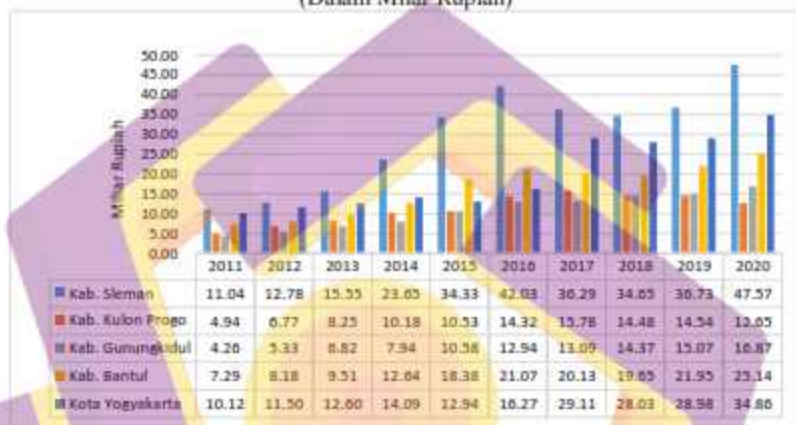
Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id> dan diolah pada tahun 2023.

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa realisasi retribusi daerah dari tahun 2011-2013 seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY selalu mengalami kenaikan pendapatan retribusi daerah. Sedangkan pendapatan retribusi daerah dari tahun 2014-2019 seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY mengalami fluktuasi.

Adanya pandemi covid-19 menyebabkan tahun 2020 seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY mengalami penurunan pendapatan retribusi daerah. Kabupaten Sleman mengalami penurunan pendapatan sebesar 28,91%. Kabupaten Kulonprogo mengalami penurunan pendapatan sebesar 3,79%. Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan pendapatan sebesar 47,31%. Kabupaten Bantul mengalami penurunan pendapatan sebesar 36,89% dan Kota

Yogyakarta mengalami penurunan pendapatan sebesar 28,12%. Berikut merupakan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020:

Tabel 1.4
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY Tahun 2011-2020
(Dalam Miliar Rupiah)

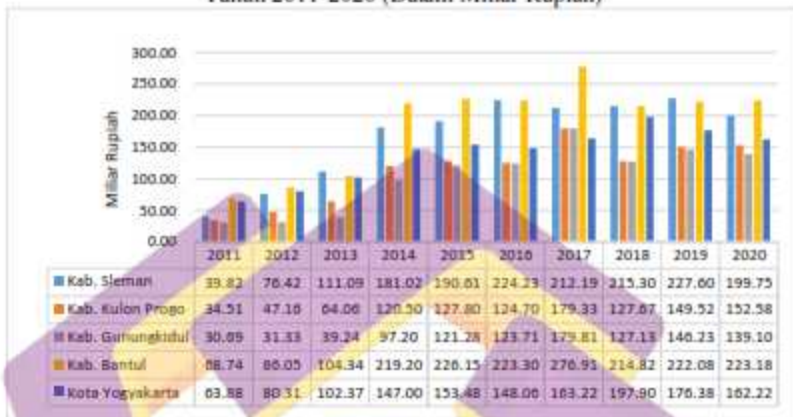


Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id> dan diolah pada tahun 2023.

Tabel 1.4 menjelaskan bahwa realisasi dari tahun 2011-2014 selalu mengalami kenaikan pendapatan. Tahun 2015 Kota Yogyakarta mengalami penurunan pendapatan sebesar 8,16%. Tahun 2016 seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY mengalami peningkatan pendapatan. Tahun 2017 Kabupaten Sleman mengalami penurunan pendapatan sebesar 13,66% dan Kabupaten Bantul mengalami penurunan pendapatan sebesar 4,46%. Sedangkan pada tahun 2018 hanya Kabupaten Gunungkidul yang mengalami kenaikan pendapatan, yaitu sebesar 9,78%. Pada tahun 2019 seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY mengalami kenaikan pendapatan.

Karena efek dari penyebaran pandemi covid-19, tahun 2020 hanya Kabupaten Kulonprogo yang mengalami penurunan pendapatan, yaitu sebesar 13,00%. Berikut merupakan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020:

Tabel 1.5
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY
Tahun 2011-2020 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id> dan diolah pada tahun 2023.

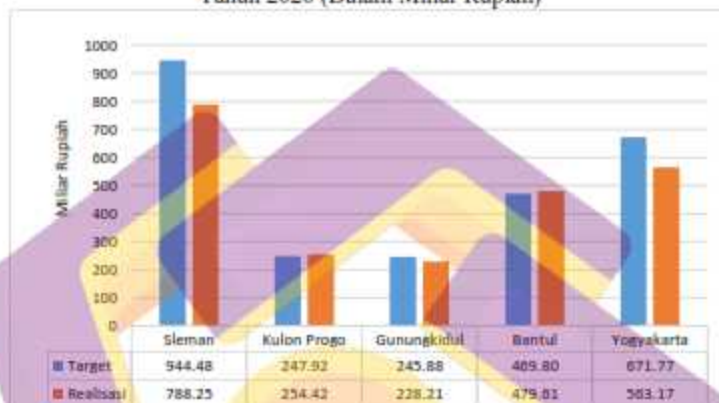
Tabel 1.5 menjelaskan bahwa realisasi dari tahun 2011-2015 seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY selalu mengalami peningkatan pendapatan. Tahun 2016 Kabupaten Kulonprogo mengalami penurunan pendapatan sebesar 2,43%. Kabupaten Bantul mengalami penurunan pendapatan sebesar 1,26% dan Kota Yogyakarta mengalami penurunan pendapatan sebesar 3,53%. Tahun 2017 hanya Kabupaten Sleman yang mengalami penurunan pendapatan, yaitu sebesar 5,37%. Tahun 2018 Kabupaten Sleman mengalami kenaikan pendapatan sebesar 1,47% dan Kota Yogyakarta mengalami kenaikan pendapatan sebesar 21,25%. Tahun 2019 hanya Kota Yogyakarta yang mengalami penurunan pendapatan, yaitu sebesar 10,87%.

Pandemi covid-19 menyebabkan tahun 2020 Kabupaten Sleman mengalami penurunan pendapatan sebesar 12,24%. Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan pendapatan sebesar 4,88% dan Kota Yogyakarta mengalami penurunan pendapatan sebesar 8,03%.

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2020 hanya Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul yang mampu melebihi target PAD. Sedangkan Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan. Berikut

merupakan target dan realisasi PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2020:

Tabel 1.6
Target dan Realisasi PAD Seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY
Tahun 2020 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id> dan diolah pada tahun 2023.

Tabel 1.6 menjelaskan bahwa Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul mampu melebihi target PAD. Realisasi PAD pada Kabupaten Kulonprogo tahun 2020 adalah sebesar Rp254,42 miliar, realisasi tersebut telah melebihi target PAD yaitu sebesar Rp247,92 miliar. Dan realisasi PAD pada Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebesar Rp479,61 miliar, realisasi tersebut telah melebihi target PAD yaitu sebesar Rp469,80 miliar.

Sedangkan Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul serta Kota Yogyakarta tidak mampu mencapai target PAD. Realisasi PAD pada Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah sebesar Rp788,25 miliar, realisasi tersebut tidak mampu mencapai target yaitu sebesar Rp.944,48 miliar. Realisasi PAD pada Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 adalah sebesar Rp228,21 miliar, realisasi tersebut tidak mampu mencapai target yaitu sebesar Rp.245,88 miliar. Realisasi PAD pada Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah sebesar Rp563,17 miliar, realisasi tersebut tidak mampu mencapai target yaitu sebesar Rp.671,77 miliar. Dengan

demikian dapat dikatakan masing-masing Kabupaten/Kota memiliki faktor pengaruh yang berbeda-beda dalam upaya peningkatan PAD.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PAD telah banyak dilakukan. Monika dan Dibyo (2022), Tiara, dkk (2022), Hani dan Siska (2021), Natasha dan Andri (2021), Yusuf dan Romandhon (2020), Rukmana dan Ratna (2020), Nugroho (2020), Ramadhan (2019), menjelaskan hasil yaitu Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan penelitian Jebarut (2021), Sari dan Miftahuljannah (2019), menjelaskan hasil sebaliknya yaitu Pajak Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD.

Hasil penelitian Natasha dan Andri (2021), Jebarut (2021), Nugroho (2020), Ramadhan (2019), menjelaskan hasil yaitu Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan penelitian Tiara, dkk (2022), Yusuf dan Romandhon (2020), Sari dan Miftahuljannah (2019), menjelaskan hasil sebaliknya yaitu Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian Monika dan Dibyo (2022), Rukmana dan Ratna (2020), menjelaskan hasil yaitu Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD.

Hasil penelitian Natasha dan Andri (2021), menjelaskan hasil yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan penelitian Monika dan Dibyo (2022), Hani dan Siska (2021), Yusuf dan Romandhon (2020), menjelaskan hasil sebaliknya yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD.

Hasil penelitian Monika dan Dibyo (2022), Yusuf dan Romandhon (2020), menjelaskan hasil yaitu Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan penelitian Hani dan Siska (2021), menjelaskan hasil yang sebaliknya yaitu Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian Monika dan Dibyo (2022), Hani dan Siska (2021), Natasha dan Andri (2021), Yusuf dan Romandhon (2020), menjelaskan hasil yaitu Variabel Bebas secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap variabel Terikat.

Dari berbagai hasil penelitian diatas, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian tidak konsisten dan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Lokasi penelitian ini adalah pada Provinsi DIY dan menggunakan rentang waktu selama sepuluh tahun, yaitu tahun 2011-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yaitu beberapa pertanyaan yang jawabannya akan diketahui dari hasil penelitian. Dari uraian pada latar belakang, maka penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020?
3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020?
4. Apakah Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020?
5. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu beberapa pertanyaan mengenai alasan peneliti untuk melakukan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020.
2. Untuk menguji secara empiris Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020.
3. Untuk menguji secara empiris Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020.
4. Untuk menguji secara empiris Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020.
5. Untuk menguji secara empiris Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap PAD seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY tahun 2011-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu keuntungan yang mampu didapatkan oleh berbagai pihak yang berasal dari hasil suatu penelitian. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta dapat memperluas wawasan penulis tentang PAD. Manfaat penelitian ini juga dapat menambah pengalaman bagi penulis.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk Universitas Amikom Yogyakarta, harapan penulis dari hasil penelitian ini yaitu dapat menjadi referensi pada perpustakaan atau bahan rujukan untuk semua orang khususnya untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti hal yang serupa supaya penelitian selanjutnya dapat lebih baik.

3. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Untuk evaluasi atau bahan masukan bagi Pemerintah Daerah seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY dalam merumuskan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah supaya mampu membuat pengaruh yang positif untuk pembangunan daerah yang selanjutnya dan untuk menopang perekonomian daerah supaya tercapai masyarakat yang sejahtera.
- b. Untuk bahan informasi bagi Pemerintah Daerah seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi DIY supaya dapat lebih memperhatikan dan membuat strategi untuk memaksimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah serta lebih mengoptimalkan biaya sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan dana pendapatan asli daerah.